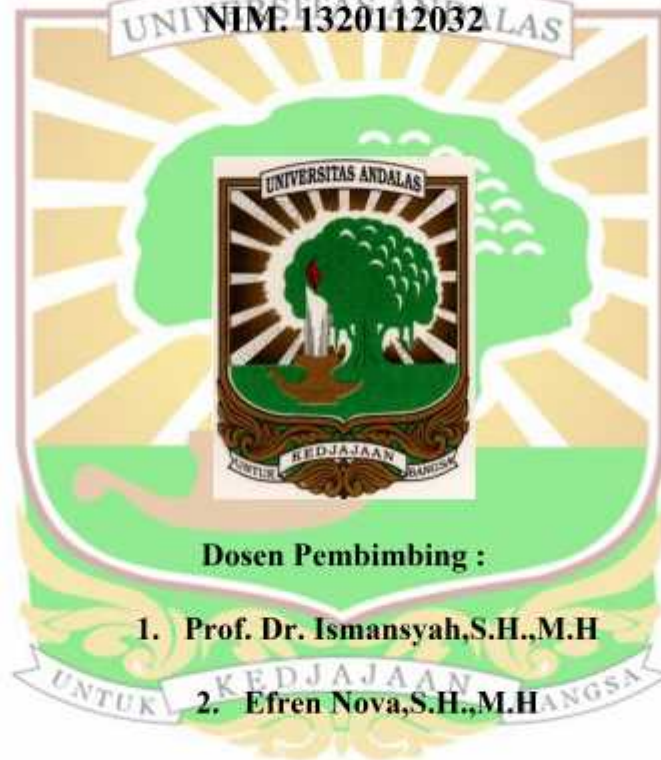


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP AJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR**

**OLEH :**

**LINDA LESTARI**

**UNINIM. 1320112032**



**Dosen Pembimbing :**

**1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**

**2. Efren Nova, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA PADA TAHAP AJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR**

(Linda Lestari, 1320112032, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 123  
halaman, 2017)

**ABSTRAK**

Setiap orang dalam suatu rumah tangga tentunya mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku serta pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas sikap dan perilaku maupun pengendalian diri masing-masing tidak dapat dikontrol dengan baik yang akhirnya dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga harus diselesaikan melalui penanganan khusus karena KDRT merupakan Tindak Pidana yang terjadi di ranah domestik yang sering menimbulkan *dark numbers*. Penerapan pidananya juga harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum sehingga tujuan pembentukan UU PKDRT yang dimuat dalam Pasal 4 UU PKDRT dapat diwujudkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam tesis adalah : 1) Mengapa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan tuntutan pidana denda terhadap Terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar? 3) Bagaimanakah pengaruh putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Penuntut Umum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar tidak pernah mengajukan tindak pidana denda didasarkan karena Tindak Pidana KDRT merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus sehingga penerapan pidana denda dinilai kurang tepat diterapkan untuk menyelesaikan kasus KDRT ini. 2. Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar selalu memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa KDRT didasarkan atas pertimbangan bahwa penerapan pidana penjara yang relatif singkat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa KDRT dan tetap dapat mempertahankan tujuan dari pembentukan UU PKDRT. 3. Putusan hakim yang demikian dapat mengurangi angka KDRT yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Batusangkar dan menanggulangi kasus KDRT yang terjadi. Untuk perbaikan penerapan pidana dalam Tindak Pidana KDRT dimasa depan diharapkan penegak hukum dapat memanfaatkan pidana denda dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT sehingga tercapai tujuan pembentukan UU PKDRT yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tahap Ajudikasi.

# **THE IMPLEMENTATION OF PENALTY ON DOMESTIC VIOLENCE IN ADJUDICATION PROCESS IN BATUSANGKAR COURT JURISDICTION**

(Linda Lestari, 1320112032, Andalas University, 123 pages, 2017)

## **ABSTRACT**

Each person yearn for unity and harmony in a happy, safe, tranquil and peaceful household. This is determined by the quality of attitude and behaviours also self-control of everyone in a household. The household's unity and harmony could be disrupted when the quality of attitude, behaviour and self-control is not properly controled and countered could leadthe occurence of domestic violence. Domestic Violence should be resolved through a special treatment because domestic violence is a criminal act in domestic area resulting dark numbers. The practice of penalty must also be given a special attention by the law enforcers therefore the purpose of the enactment of Domestic Violence Act (UU PKDRT) which enacted in article 4 Domestic Violence Act could be actualized. With the basis of this background, the problems in the thesis are : 1) Why do the prosecutor had never apply penalty of fine towards the defendant of domestic violence case in Batusangkar Court Jurisdiction? 2) What are the bases of the Judges consideration in imposing imprisonment on the defendant of domestic violence in the jurisdiction of the Batusangkar District Court? 3) How is the implication of prison sentences imposed by the Judge on the handling of domestic violence in theBatusangkar District Court Jurisdiction?. The method used in this research is the sociological juridical method. The type of research is descriptive by using primary data and secondary data. The result of the research shows that 1. Public Prosecutor in Batusangkar District Court Jurisdiction never filed a criminal act to be circulated with penalty of fine because the criminal act of domestic violence is a criminal act which has special characteristic so that the application of criminal penalty is not appropriately applied to solve this case of domestic violence. 2. The judge in the Batusangkar District Court in regularly decided the imprisonment of the Domestic Violence Defendant was based on the consideration that a relatively short prisoner imprisonment was expected to give deterrent effect to the domestic violence defendant and still maintain the goal of forming the PKDRT Act. 3. Such decision of judge(jurisprudence) may reduce the number of domestic violence that occurs in the Jurisdiction of the Batusangkar Court and prevent the future cases of domestic violence. To improve criminal application in Criminal Acts in the future, it is expected that law enforcers can utilize additional penalty and criminal penalty as stipulated in article 50 UU PKDRT so as to achieve the goal of the establishment of better PKDRT Act.

**Keywords:** Penal Implementation, Domestic Violence, Adjudication process.